

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan).

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber pendapatannya adalah dari pemungutan pajak, baik dari Pajak Negara maupun Daerah. Menurut Prof. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2009) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak sangat penting bagi pembangunan nasional Indonesia karena pajak memberikan kontribusi yang sangat besar untuk penerimaan kas Negara. Menurut Suryadi (2006) dalam Pramushinta dan Siregar (2011) menyatakan bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, tetapi presentase kenaikan tersebut belum mencerminkan kondisi yang diinginkan. Kondisi seperti ini disebabkan oleh Wajib Pajak yang potensial

yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, serta disebabkan pula oleh wajib pajak yang berusaha membayar pajak sekecil mungkin.

Marcus Taufan Sofyan (2005) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pertama kali ditandai dengan dibentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua yang mulai beroperasi sejak 9 September 2002. Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar secara khusus menangani administrasi perpajakan Wajib Pajak besar badan tingkat nasional dengan kriteria peredaran usaha, pembayaran pajak atau jumlah tunggakan pajak yang terbesar. Dengan peranan pengelolaan penerimaan pajak sampai dengan akhir 2004 sebesar 23,14% dari penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (nasional), Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar telah menjadi proyek percontohan pelaksanaan keseluruhan program modernisasi administrasi perpajakan secara utuh dengan menampilkan prototipe Kanwil dan KPP yang modern, didukung organisasi yang ramping, teknologi informasi yang memberikan percepatan pelayanan

profesional dengan penerapapan kode etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ketat (Nasucha, 2004: 9).

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu antara lain pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka penggalan potensi Wajib Pajak. Selain itu, SPN memiliki tugas yang berat yaitu mengamankan target penerimaan pajak dan penerimaan Negara. Tugas ini tidaklah mudah karena adanya kemungkinan hambatan atau masalah seperti respon negatif dari responden dengan menghindari petugas sensus, menjawab pertanyaan dengan asal, tidak bersedia menandatangani formulir sampai dengan tindakan konfrontatif terhadap petugas sensus (www.pajak.com) dalam Dewinta (2012). Pandangan positif masyarakat terhadap pelayanan Sensus Pajak Nasional akan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Dewinta (2012) meneliti tentang pengaruh persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, menyimpulkan bahwa persepsi pelaksanaan sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini hasil replikasi penelitiannya Lisa Humairah, dkk (2013) “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh secara parsial dan bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate.

Dari uraian di atas maka peneliti ini mengambil judul: **”Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sensus pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditengahkan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Menganalisis pengaruh sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan berfikir dalam pengembangan wawasan dalam bidang perpajakan serta sebagai ajang yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris bagi para akademisi mengenai pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini berisikan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini meliputi: landasan teori yang berisi penerapan sistem administrasi perpajakan modern, sensus pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kerangka teori, hipotesis penelitian dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN, Pada bab ini menjelaskan tentang cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan, yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, instrumen pengumpulan data, metode pengumpulan data, metode pengujian kualitas data, metode analisis data serta hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini berisi pelaksanaan penelitian, diskriptif data berdasarkan karakteristik Responden yaitu jenis kelamin dan universitas, uji instrumen penelitian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, hasil uji prasyarat yaitu hasil uji asumsi klasik dan uji hipotesis, serta pembahasan atas hasil analisis data.

BAB V PENUTUP, Pada bab ini berisi kesimpulan, kendala penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya.